

Rekomendasi Kebijakan

Memperkuat Ikhtiar Kemenag Mencipta Damai

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia
Hak Cipta 2023, pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Pengarah Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Memperkuat Ikhtiar Kemenag Mencipta Damai

© Haris Burhani, dkk 2023
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang x + 58 halaman,
148 x 210 mm
Cetakan I, Desember 2023

Penulis
Haris Burhani, Alamsyah M Dja'far, Fahmi Syahirul Alim

Penyelia
Aksara Miftah Fadhlullah

Rancang Sampul & Tata Letak Isi
Miftah Fadhlullah

ISBN:

Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
2023

Daftar Isi

Ikhtiar Kementerian Agama Mencipta Damai	4
Temuan-temuan Utama	5
Rekomendasi-Rekomendasi	6

Ikhtiar Kementerian Agama Mencipta Damai

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan wajah keagamaan moderat. Toleransi antaragama dan antaretnis memiliki akar sejarah kuat. Seperti terekam dalam perjalanan kontemporer, nilai, dan tradisi agama memberi kontribusi penting bagi penguatan nilai dan praktik demokrasi di Indonesia. Praktik dan kemajuan itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan peran dari berbagai elemen dan arah: dari masyarakat dan negara.

Di tingkat masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan memperlihatkan peran dan kekuatan penting dalam menggerakkan kehidupan warga di akar rumput. Mereka memiliki jejaring organisasi hingga ke tingkat paling bawah dan tidak jarang mengisi peran dasar pemerintah yang belum berjalan baik seperti pada bidang pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Di tingkat pemerintah, negara menjalankan program-program terkait penyelenggaraan kehidupan keagamaan seperti pemberdayaan organisasi keagamaan, langsung maupun tidak. Melalui kebijakan, negara memfasilitasi berbagai lembaga yang mengurus masalah-masalah keagamaan dan kerukunan secara umum.

Namun, sejarah Indonesia juga memperlihatkan, konflik (termasuk konflik keagamaan) menjadi tantangan serius kehidupan bangsa Indonesia. Sepanjang 1990-2001, konflik di Indonesia mengakibatkan 10.402 orang meninggal.¹ Pada periode berikutnya, sepanjang 2008 – 2010, tercatat 2.498 insiden kekerasan mengakibatkan 340 orang meninggal dan sisanya luka berat dan ringan.

Kajian yang disusun Hengki Ferdiansyah, dkk., dalam *Ikhtiar Kemenag Mencipta Damai* (2023) memperlihatkan lebih jauh berbagai ikhtiar Kementerian Agama membangun perdamaian dan mengatasi konflik-konflik keagamaan. Khususnya peran Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik (BPKI-PK) dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).

Institusi pertama berfokus pada penyelesaian konflik atau masalah internal umat Islam, sedang yang kedua berfokus pada konflik antaragama. Dari sisi periode, peran kedua lembaga ini dibatasi pada periode 2019 - 2022. Pembatasan dilakukan program pengarusutamaan Moderasi Beragama diluncurkan Kementerian Agama pada 2019 dan pada 2020 masuk dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Agama 2020 – 2024.

Rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian *Ikhtiar Kemenag Mencipta Damai* (2023). Rekomendasi kebijakan ini menyorot berbagai temuan utama terkait konflik dan peran BPKI-PK dan PKUB. Dari sini, disusun sejumlah rekomendasi.

¹ Rio Soumahu, *Dinamika Konflik dan Kekerasan* (Jakarta; Institut Titian Perdamaian, 2012), 2.

Temuan-temuan Utama

- Sepanjang 2019 – 2022 ditemukan 86 kasus konflik agama berkaitan dengan antaragama atau intraagama. Konflik antaragama sebanyak 29 kasus (34%) dan intraagama 57 kasus (66%). Potensi konflik intraagama, khususnya internal umat Islam, lebih tinggi dibanding antaragama.
- Tipologi Konflik antaragama di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga isu besar: konflik rumah ibadah, pembatasan aktivitas dan ekspresi keagamaan, dan pemaksaan atribusi agama tertentu terhadap pemeluk agama lain. Dalam tiga tahun terakhir ini, konflik antaragama paling tinggi berkaitan dengan masalah rumah ibadah. Sedang tipologi konflik intraagama, terbagi dalam empat isu: penyesatan kelompok yang berbeda di dalam Islam, pembatasan aktivitas dan ekspresi keagamaan, rumah ibadah, dan terorisme. Kasus penyesatan terhadap kelompok lain ini paling banyak ditemukan pada 2019 – 2022.
- Konflik keagamaan paling tinggi terjadi pada 2019. Di tahun ini, konflik mencapai 34 peristiwa, memuncak pada Desember, ditemukan ada tujuh kasus. Tren menurun pada 2020 karena Covid-19. Namun konflik kembali naik pada 2021. Pada tahun ini konflik keagamaan terjadi 20 kasus, paling banyak terjadi bulan Oktober dan Desember.
- Aktor negara memperlihatkan peran pentingnya dalam meredam eskalasi konflik. Namun, studi ini juga memperlihatkan peran itu belum digunakan secara maksimal. Dalam beberapa kasus masih ditemukan aktor negara yang memperkuat eskalasi konflik, alih-alih meredamnya.

“Kemenag RI itu juga punya mitra, lembaga kerukunan yang kita sebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini biasanya modal kita kalau ada dinamika konflik di lapangan terutama terkait konflik antaragama, contoh sekarang ya kasus di Cilegon. *Nah*, kita langsung kontak kanwilnya, dan kita kontak FKUB-nya. Terlebih jika konflik tersebut mengenai tempat ibadah atau lainnya. Di sana kita minta, melakukan dialog agar tercipta deeskalasi konflik.”²

Wawan Djunaedi, Kepala PKUB

- Dari 86 konflik yang terjadi pada 2019-2020, Kementerian Agama terlibat merespons sebanyak 31 kasus (36 %) kasus yang direspons Kementerian Agama. Sementara 55 (64 %) kasus lainnya tidak mendapat respons.
- Dalam merespons dan mengatasi berbagai konflik yang terjadi sepanjang 2019-2022, BPKI-PK dan PKUB menjalankan enam peran utama: membuka ruang dialog, melibatkan penyuluh sebagai agen resolusi konflik, mengeluarkan pernyataan

² Wawancara dengan Wawan Djunaedi, Senin 13 September 2022.

publik, menggandeng mitra lokal, melibatkan aparat keamanan (*peacekeeping*), dan membangun *peacebuilding*.

Dalam meningkatkan kapasitas penyuluh sebagai agen resolusi konflik, Subdit BPKI-PK tahun 2022 menginisiasi program Seleksi Penyuluh Agama Agen Resolusi Konflik (SPARK). Kegiatan ini memiliki tiga tujuan, salah satunya membentuk keterampilan para penyuluh agama terkait deteksi dan respons dini konflik keagamaan berlatar perbedaan paham dan budaya Islam, dan memotivasi penyuluh untuk aktif di lapangan.³ Kesadaran melibatkan penyuluh agama sebagai agen resolusi konflik tidak hanya muncul dari pusat, tetapi juga berasal dari kantor wilayah Kementerian Agama. Kanwil Sumatera Barat misalnya, mereka memperdayakan penyuluh agama dengan membuat program *One Penyuluh, One Village*.⁴

- Keenam peran tersebut dilakukan dengan beragam cara, mulai membangun dialog dengan tokoh agama di wilayah konflik dan memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menggerakkan penyuluh yang sudah dibekali program peningkatan kapasitas, membuat pernyataan publik melalui media nasional dan lokal, meminta aparat kepolisian terlibat mencegah, serta bina damai yang melibatkan aktor-aktor lokal.

Rekomendasi-Rekomendasi

Berangkat dari berbagai upaya mengatasi konflik berikut tantangannya, kajian ini merekomendasikan tiga langkah strategis berikut:

1. Kementerian Agama juga perlu menyusun regulasi komprehensif untuk menangani konflik sosial keagamaan, meningkatkan kapasitas ASN Kementerian Agama di tingkat pusat hingga daerah terkait penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan, membuat laporan tahunan penanganan konflik, mempertegas wilayah dan kolaborasi kerja Subdit BPKI-PK dan PKUB.
2. Direktorat Bimas Islam dan PKUB perlu meningkatkan kapasitas aktor di masyarakat khususnya ormas keagamaan yang terlibat dalam eskalasi dan deeskalasi konflik. Peningkatan kapasitas ini ditujukan terutama untuk memperkuat perspektif jaminan negara terhadap warga dalam beribadah dan berkeyakinan, penguatan perspektif korban, dan kemampuan membangun komunikasi dengan media arus utama serta media alternatif.
3. Direktorat Direktorat Bimas Islam dan PKUB perlu memaksimalkan program-program penguatan kapasitas bina damai di lingkungan pemangku kepentingan keamanan

³ Wawancara dengan Akmal Salim Ruhana (Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama), Selasa, 20 September 2022

⁴ Wawancara dengan Dr. H. Helmi, M.Ag (Kanwil Kemenag Sumatra Barat), Rabu, 21 September 2022.

(Kepolisian dan TNI). Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi, penguatan kapasitas dimaksudkan agar pencegahan konflik keagamaan berbasis pada perspektif konstitusi dan hak asasi manusia.